

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era reformasi saat ini telah banyak perubahan dalam berbagai bidang pembangunan dan pemerintahan. Perubahan dalam pemerintahan adalah mulai diberlakukannya otonomi daerah yang diatur dalam UU.No.22/1999 mengenai pemerintahan daerah dan UU.No.25 /1999 mengenai perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya, pemerintah dan masyarakat di daerah berwenang dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karier politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif (Syaukani 2002:174).

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masing-masing daerah serta berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Hal ini dikarenakan daerah akan diberi peran yang lebih besar melalui penyerahan semua urusan pemerintahan serta sumber-sumber keuangannya, kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, kebijakan moneter dan fiskal, agama dan perencanaan sosial. Kurang Stabilitasnya keuangan pusat akibat krisis ekonomi, mengakibatkan daerah diberikan wewenang untuk mencari sumber-sumber pendapatan dan mengurus kebutuhan sendiri agar beban pemerintahan

pusat menjadi berkurang (Izza, 2001:110).

Menurut Kamaluddin (1987:46), maksud dan tujuan dari otonomi daerah dan desentralisasi daerah adalah:

1. Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah di daerah, selain itu memberi peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada tingkat lokal tersebut.
2. Meningkatkan sinergisitas serta dukungan dari pusat dalam kebutuhan usaha pembangunan daerah.
3. Penyusunan program-program pembangunan untuk perbaikan dan penyempurnaan sosial ekonomi pada tingkat lokal akan menjadi realistis.
4. Melatih dan mengajar masyarakat yang ada di daerah untuk bisa mengatur rumah tangganya masing-masing.
5. Terciptanya pembinaan dan pengembangan daerah dalam rangka kesatuan nasional.

Memasuki era otonomi daerah, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan ekonomi, menjadi makin banyak dan berkembang. Hubungan ekonomi antar region menjadi semakin bervariasi dan bertambah intensitasnya. Demikian juga hubungan dan keterkaitan antar sektor ekonomi sudah semakin kompleks sehingga tidak tepat lagi pembangunan ekonomi dengan berdasarkan pada ego sektoral. Hal ini karena kemajuan suatu sektor tidak mungkin tercapai tanpa dukungan sektor-sektor lainnya. Dengan kata lain terdapat kaitan mata rantai antar sektor yang satu dengan sektor lainnya. Mencermati tantangan dan permasalahan pembangunan

ekonomi yang terjadi saat ini diperlukan suatu perangkat evaluasi yang bersifat lintas sektoral, menyeluruh dan konsisten. Salah satu instrumen tersebut adalah tabel input-output (Tabel I-O, 2010).

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya sadar yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan secara merata bagi segenap lapisan masyarakat. Oleh karenanya keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah daerah saja, melainkan sebagai tanggungjawab bersama seluruh komponen masyarakat di daerah yang bersangkutan. Agar pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran yang diinginkan bersama, proses pembangunan harus terencana dan terprogram secara mapan.

Sebagai daerah otonom, sesuai Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999, Pemerintah Propinsi Maluku Utara beserta Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangkaian pembangunan daerah, Pemerintah Daerah telah menerapkan konsepsi rencana induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat dasar filosofi, visi, misi, arah kebijakan bagi pelaksanaan pembangunan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di daerah. Pola Pembangunan wilayah Maluku Utara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara dilaksanakan melalui beberapa pendekatan, yaitu (1) Pengembangan Wilayah Terpadu, (2) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi/Andalan, (3) Kecamatan

Sebagai Pusat Pertumbuhan, (4) Pengembangan Kawasan Strategis, (5) Kawasan Tertinggal, (6) Pengembangan Sistem Kota-kota, dan (7) Penataan Ruang dan Pertanahan.

Setelah pemekaran wilayah kabupaten di Propinsi Maluku menjadi propinsi otonom dan hanya berselang waktu \pm 2 bulan wilayah ini dilanda konflik yang mengakibatkan tatanan ekonomi dan sosial kemasyarakatan maupun prasarana dan sarana yang telah dibangun sebelumnya menjadi hancur. Namun selama periode 1999-2001 perekonomian Maluku Utara mulai kembali menunjukkan perkembangan, seperti ditunjukkan dalam PDRB menurut harga berlaku yang mengalami peningkatan sebesar 3,51% pertahun dengan tingkat pertumbuhan 1,2% pertahun.

Pembangunan daerah dalam bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas pembangunan daerah, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Penetapan prioritas dimaksud dilandasi masalah dan tantangan yang dihadapi serta arahan kebijakan Pola Dasar 2005-2010 dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka menengah.

Krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, serta timbulnya konflik horizontal di daerah ini tahun 1999 telah menyebabkan pertumbuhan perekonomian wilayah yang relatif kecil dengan laju inflasi yang meningkat pesat sehingga berdampak kepada semakin beratnya taraf hidup rakyat serta meningkatnya jumlah pengangguran.

Kebijakan pembangunan ekonomi Propinsi Maluku Utara diarahkan pada terciptanya kondisi untuk tumbuh dan berkembangnya sistem perekonomian yang memberikan peluang bagi segenap pelaku ekonomi secara proporsional yang terkait secara fungsional, sehingga membentuk kekuatan ekonomi yang sinergis dengan mengintegrasikan beberapa kebijakan regional dan sektoral.

Dalam upaya penataan perekonomian, pemerintah daerah ini juga telah berupaya meningkatkan peran usaha kecil dalam pembangunan ekonomi agar dapat bersinergi dengan pelaku ekonomi lainnya, antara lain melalui upaya relokasi dan pemerataan secara seimbang aset-aset produksi dan melalui peningkatan keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha kecil dan usaha besar.

Peranan lembaga pemerintah dalam upaya pengembangan usaha kecil di Propinsi Maluku Utara, lebih dititik-beratkan kepada upaya meningkatkan kemampuan pengusaha kecil, baik internal maupun eksternal. Pembinaan secara internal diarahkan kepada kemampuan pengusaha dalam mengelola usaha melalui kegiatan pelatihan manajerial, wirausaha dan teknologi produksi, sementara pembinaan eksternal lebih diarahkan kepada upaya membuka jalan kepada pengusaha kecil dalam memasarkan produknya baik lokal, nasional atau bahkan ekspor. Adapun sektor unggulan di wilayah ini adalah perikanan laut, pertambangan batu mulia dan wisata bahari (Bank Indonesia, 2007)

Tinjauan makro ekonomi Propinsi Maluku Utara pada tahun 2010 didominasi oleh sektor perdagangan (32,73%), kelapa (15,85%) industri furniture (11,44%), jasa pemerintahan umum (8,02%), tabama lainnya (7,03%), perikanan

lainnya (6,33%), kehutanan (5,09%), cengkeh (4,64%), komunikasi (4,54%), dan pertambangan nikel (4,32%) diikuti sektor lainya sebesar (33,79%). (BPS, Maluku Utara 2010).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dan daerah, khususnya pembangunan ekonomi di Propinsi Maluku Utara dan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi daerah secara optimal, maka pembangunan daerah dapat disusun menurut tujuan antar sektor. Perencanaan sektoral dimaksudkan untuk pengembangan sektor-sektor tertentu disesuaikan dengan keadaan dan potensi masing-masing sektor dan juga tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Dengan menggunakan tabel Input-Output (I-O) Propinsi Maluku Utara tahun 2010 akan dijabarkan sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan di Propinsi Maluku Utara. Selanjutnya diharapkan dapat dipakai sebagai informasi yang komprehensif agar tepat guna dan tepat sasaran bagi perekonomian Propinsi Maluku Utara.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan dalam struktur perekonomian Propinsi Maluku Utara berdasarkan tabel Input Output Propinsi Maluku Utara tahun 2010.
2. Seberapa besar keterkaitan antar sektor kegiatan ekonomi dalam perekonomian Propinsi Maluku Utara berdasarkan tabel Input Output Propinsi Maluku Utara tahun 2010.

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Sesuai dengan uraian di atas maka tujuan penelitian dalam menganalisis dan membandingkan sektor unggulan dalam perekonomian Propinsi Maluku Utara tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sektor-sektor unggulan dalam perekonomian Propinsi Maluku Utara guna menentukan kebijaksanaan yang harus dijalankan.
- b. Untuk menghitung tingkat keterkaitan antara berbagai sektor kegiatan ekonomi guna memperoleh gambaran mengenai kontribusi suatu sektor terhadap perekonomian secara keseluruhan.
- c. Menganalisis sektor-sektor unggulan di Propinsi Maluku Utara berdasarkan tabel input-output Propinsi Maluku Utara tahun 2010.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai masukan dan bahan perbandingan bagi pembuat kebijaksanaan dalam menyusun strategi pembangunan Propinsi Maluku Utara.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan data bagi penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini merupakan salah satu proses aplikasi dari teori-teori ekonomi yang telah diterima penulis selama studi.

1.4 Metodologi Penelitian

1. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu tabel input output perekonomian Propinsi Maluku Utara tahun 2010. Tabel input output disajikan dalam bentuk matriks yang diklasifikasikan menjadi 40 sektor perekonomian. Data tabel input output perekonomian Propinsi Maluku Utara tahun 2010 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Maluku Utara dan dari instansi terkait lainnya.

2. Metode Dan Alat Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model input-output. Model input-output pertama kali dikembangkan oleh Wassily Leontief pada tahun 1930-an. Idenya sangat sederhana namun mampu menjadi salah satu alat analisis yang ampuh dalam melihat hubungan antar sektor dalam perekonomian (Nazara, 1997:48). Komponen yang paling penting dalam analisis input output adalah inverse matriks tabel input output, yang sering disebut sebagai inverse Leontif (Miller, 1985:15). Matriks ini mengandung informasi penting tentang bagaimana kenaikan produksi dari suatu sektor (industri) akan menyebabkan berkembangnya sektor-sektor lainnya. Matriks kebalikan leontif merangkum seluruh dampak dari perubahan produksi suatu sektor terhadap total produksi sektor-sektor lainnya ke dalam koefisien-koefisien yang disebut sebagai *multiplier* (a_{ij}). Multiplier ini adalah angka-angka yang terlihat di dalam matriks $(1-A)^{-1}$. Adapun analisis yang akan dihitung

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Indeks Keterkaitan ke depan

Konsep ini diartikan sebagai kemampuan suatu sektor untuk mendorong pertumbuhan produksi sektor-sektor lain yang memakai input dari sektor ini. Total keterkaitan ke depan disebut juga sebagai indeks derajat kepekaan (*degree of sensitivity*) yang digunakan untuk mengukur kaitan ke depan, menurut Wassily Leontief, 1930.

b. Indeks keterkaitan ke belakang

Konsep ini diartikan sebagai kemampuan suatu sektor untuk meningkatkan pertumbuhan industri hulunya. Indeks total keterkaitan ke belakang disebut juga sebagai indeks daya penyebaran (*power of dispersion*) yang digunakan untuk mengukur kaitan ke belakang, menurut Wassily Leontief, 1930.

c. Analisis Sektor Kunci

Dari analisis I-O dapat dilihat sektor-sektor kunci yang memiliki *backward linkages* (keterkaitan ke belakang) atau disebut juga derajat kepekaan yang tinggi dan *forward linkages* (keterkaitan ke depan) atau daya sebar yang tinggi. Sektor yang mempunyai daya penyebaran tinggi menunjukkan sektor tersebut mempunyai daya dorong yang cukup kuat dibandingkan sektor lainnya. Sedangkan sektor yang mempunyai derajat kepekaan yang tinggi menunjukkan bahwa sektor tersebut mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sektor lain. Sektor kunci didefinisikan sebagai sektor yang memegang peranan

penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan ditentukan berdasarkan indeks total keterkaitan ke belakang dan ke depan. Sektor kunci adalah sektor yang memiliki indeks total keterkaitan ke belakang dan ke depan lebih besar dari satu (Nazara, 1997).

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika Penulisan

Bab II Landasan Teori

Berisi tentang peran dan fungsi sektor unggulan dalam perekonomian dan Tabel Input Output perekonomian Propinsi Maluku Utara serta teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, tinjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan ruang lingkup penelitian, teknik analisis data, jenis dan sumber data.

Bab IV Analisis Data Dan Pembahasan

Menguraikan tentang diskripsi data tabel Input Output Propinsi Maluku Utara tahun 2010, Pembahasan dan hasil analisis yang meliputi hubungan keterkaitan kedepan, keterkaitan kebelakang, analisis sektor kunci dan intrepretasi ekonomi.

Bab V Penutup

Membahas tentang kesimpulan dan saran